

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

1. PETUGAS PERSIDANGAN

Desk : 03
 Provinsi : Papua Pegunungan
 Pimpinan Sidang 1 : Direktur Regional III (Diwakilkan)
 Pimpinan Sidang 2 : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika
 Notulis Aplikasi : Sakinah Shabrina Dhea
 Notulis Offline: Siti Yuszahra Adila
 Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
1. <i>Bapperida Provinsi Papua Pegunungan</i>	1. <i>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i> 2. <i>Kementerian Kesehatan</i> 3. <i>Kementerian Pertanian</i> 4. <i>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</i> 5. <i>Kementerian Komunikasi dan Informatika</i> 6. <i>Kementerian Perhubungan</i>	1. <i>Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan</i> 2. <i>Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat</i> 3. <i>Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika</i> 4. <i>Direktorat Pangan dan Pertanian</i> 5. <i>Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman</i> 6. <i>Direktorat Sumber Daya Air</i> 7. <i>Direktorat Transportasi</i>

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	Pengembangan Bandar Udara Wamena, Kabupaten Jayawijaya	700	700	meter	Kab. Jayawijaya	Kementerian Perhubungan	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Prasarana Bidang Konektivitas Udara		Pengembangan Bandar Udara Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga				Direktorat Sektor Bappenas	
		Sesuai dengan pembahasan Rakortek							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
2	Pembangunan Jalan Ruas Tiom - Dimba - Tolikara	10	0	Km	1. Kab. Tolikara 2. Kab. Lanny Jaya	Kementerian PUPR	Ditolak (Diusulkan melalui mekanisme DAK)		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		006 - Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Bapperida Prov. Papua Pegunungan <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan ruas jalan dengan status kabupaten yang menghubungkan ruas nasional Wamena – Tiom dengan Wamena – Karubaga sehingga diusulkan dengan pembiayaan APBN - Apabila diusulkan dengan DAK, apakah bias ditingkatkan statusnya menjadi status nasional 		Kementerian PUPR (Bina Marga) <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan tersebut bukan merupakan ruas jalan nasional sehingga penanganan dapat diusulkan melalui Skema DAK - Untuk Inpres Jalan Daerah sudah berakhir pada tahun 2024. Sehingga, akan dibahas lebih lanjut mengenai penanganan jalan daerah - Mengenai SK Jalan terbit tahun 2022 sehingga apabila 		Dit. Transportasi <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan tersebut sebelumnya diusulkan dalam Inpres Jalan Daerah dengan kewenangan merupakan jalan kabupaten. - Diharapkan dapat dialihkan dengan skema pembiayaan DAK atau Dana Otsus. Untuk jalan ruas nasional berfokus pada penyelesaian ruas jalan Trans Papua 					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		sehingga bias menggunakan pembiayaan APBN	<p>ditingkatkan menjadi jalan nasional dapat dilakukan pada tahun 2027. Dikarenakan SK Jalan dikeluarkan paling cepat 5 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jalan daerah menjadi jalan nasional terdapat beberapa persyaratan teknis dan administrasi (1) Perlu ROW minimum sebesar 25 m; (2) Kondisi ruas jalan yang bias ditingkatkan adalah ruas jalan pemerintah; (3) Dalam 5 tahun terakhir ruas tersebut terdapat penanganan sebagai komitmen dari pemerintah daerah terhadap ruas jalan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila ditangani dengan DAK maka ruas jalan tersebut perlu masuk ke dalam Lokasi Prioritas. Apabila terdapat tematik yang cocok, maka bisa ditambahkan. Saat ini, masih dalam tahap menentukan tematik yang tepat. 			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah	1	1	Dokumen	1. Kab. Jayawijaya 2. Kab. Pegunungan Bintang 3. Kab. Yahukimo 4. Kab. Tolikara	Kementerian Kesehatan	Diakomodir

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

	dengan Imunisasi				5. Kab. Mamberamo Tengah 6. Kab. Yalimo 7. Kab. Lanny Jaya 8. Kab. Nduga		
	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
	01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		01 - Kesehatan untuk Semua		
	Program	Kegiatan		KRO		RO	
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengelolaan Imunisasi		Koordinasi		Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi	
	Catatan dan Tanggapan						
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
	Sesuai dengan pembahasan Rakortek						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
4	Pengelolaan Pelayanan	1	1	Dokumen	1. Kab. Jayawijaya 2. Kab. Pegunungan Bintang 3. Kab. Yahukimo	Kementerian Kesehatan	Diakomodir

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kesehatan Penyakit TB				4. Kab. Tolikara 5. Kab. Mamberamo Tengah 6. Kab. Yalimo 7. Kab. Lanny Jaya 8. Kab. Nduga			
	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
	01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		01 - Kesehatan untuk Semua		
	Program	Kegiatan	KRO		RO		
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP-6)		
	Catatan dan Tanggapan						
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
	Sesuai dengan pembahasan Rakortek						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
5		100	100	Unit	1. Kab. Jayawijaya 2. Kab. Tolikara	Kementerian PUPR	Diakomodir

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

	Pembangunan Rumah Khusus Reguler				3. Kab. Mamberamo Tengah 4. Kab. Yalimo 5. Kab. Lanny Jaya	
	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
	01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		01 - Kesehatan untuk Semua	
	Program	Kegiatan	KRO		RO	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		Penyediaan Rumah Khusus Reguler	
	Catatan dan Tanggapan					
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas	
	Bapperida Prov. Papua Pegunungan <ul style="list-style-type: none"> - Lahan dan RC sudah siap di masing-masing kabupaten - Sementara akan fokus di satu kabupaten yaitu Kab. Jayawijaya 		Kementerian PUPR (Ditjen Perumahan) <ul style="list-style-type: none"> - RC sudah harus selesai 		Dit. Perkim: <ul style="list-style-type: none"> - Usulan dapat diakomodir dengan catatan sudah ada skema serah terima asset, penanganan PSU, perpanjangan air bersih, Fasos dan Fasum - Melihat pembahasan sebelumnya sudah ada pembahasan usulan tersebut saat Konreg 	
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
6	Penyusunan dokumen Kebijakan Internal SPBE	1	1	Dokumen	Kab. Jayawijaya	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		03 - Transformasi Tata Kelola		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		06 - Tranformasi Digital			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pengembangan infrastruktur dan layanan aplikasi pemerintahan		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			OM Aplikasi Generik Berbasis Cloud Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Sesuai dengan pembahasan Rakortek							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
7	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60	60	Orang	Kab. Jayawijaya	Kementerian Kesehatan	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Sumber Daya Manusia Kesehatan	01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		01 - Kesehatan untuk Semua				
	Program		Kegiatan		KRO			RO	
	Program Kesehatan Masyarakat		Pembinaan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat		Pelatihan Bidang Kesehatan			Tenaga Kesehatan yang diorientasi/dilatih Manajemen Puskesmas (LP-1)	
	Catatan dan Tanggapan								
	Pemerintah Daerah			Kementerian Lembaga				Direktorat Sektor Bappenas	
	Sesuai dengan pembahasan Rakortek								
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
8	Revitalisasi Museum Wesaput - Wamena - Jayawijaya	1	0	Unit	Kab. Jayawijaya	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata			
		Program		Kegiatan		KRO		RO	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Pengelolaan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Revitalisasi Museum dan Galeri		
Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		<p>Bapperida Provinsi Papua Pegunungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Rakortekrenbang diarahkan untuk dianggarkan melalui alokasi DAK. Apabila ditolak seharusnya dalam Rakortekrenbang ditolak agar dapat diganti dengan usulan yang baru 	<p>Kemendikbudristek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan ditolak karena pada tahun 2025 tidak adanya anggaran yang cukup. - Disarankan untuk berkoordinasi dengan UPT di Provinsi Papua Pegunungan untuk berkoordinasi dengan PUPR dalam pembangunan fisik - Dapat diusulkan pada periode DAK selanjutnya. Pada tahun 2025 sudah menetapkan 10 lokus yang mana belum ada Prov. Papua Pegunungan 	<p>Dit. APK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan ditolak mengingat dalam anggaran Kemendikbudristek tidak ada anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi museum tersebut - Usulan tersebut dapat direkomendasikan dalam DAK pada periode selanjutnya dapat diajukan 			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
9	Pelatihan SDM Bidang	160	160	Orang	1. Kab. Jayawijaya 2. Kab. Pegunungan Bintang 3. Kab. Yahukimo	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Diakomodir Dengan catatan:

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pariwisata dan Kebudayaan				4. Kab. Tolikara 5. Kab. Mamberamo Tengah 6. Kab. Yalimo 7. Kab. Lanny Jaya 8. Kab. Nduga		Pemda perlu berkoordinasi dan bersurat kepada Kemendikbud	
	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
	01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		13 - Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		
	Program	Kegiatan		KRO			RO
	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan		Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan			Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya
	Catatan dan Tanggapan						
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
	-		Kemendikbudristek <ul style="list-style-type: none"> - Perihal kuota belum dapat dipastikan dan akan disesuaikan dengan anggaran yang ada - Pemda diarahkan untuk dapat bersurat ke Ditjen Kebudayaan serta berkoordinasi dengan balai yang ada di Papua termasuk 		Direktorat APK <ul style="list-style-type: none"> - Usulan dapat diakomodir namun diharapkan adanya konfirmasi perihal kuota. RO yang dapat diakomodir hanya 1-2 orang/provinsi - Alternatif lainnya pemprov dapat bersurat ke Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan untuk bekerja sama terkait 		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

				perihal jumlah usulan yang diajukan		pelatihan ini, adapun pelaksanaannya dapat ditanyakan ke Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
10	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah dan Air Baku	1	0	Km	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	<p style="text-align: center;">Ditolak</p> <p style="text-align: center;">Dengan catatan akan tetap dibangun tahun 2025 dengan catatan kepastian pengelola PDAM</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi		Prasarana Jaringan Sumber Daya Air			Jaringan utama irigasi premium yang dibangun	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
<ul style="list-style-type: none"> - Usulan untuk menindaklanjuti ketersediaan air baku yang sudah dibangun di Walesi. Saat ini, belum ada jaringan sampai ke Konsumen baru Intake 		Kementerian PUPR (Ditjen SDA) <ul style="list-style-type: none"> - Untuk sambungan rumah ke SR dapat berkoordinasi dengan Cipta Karya - Untuk usulan adalah irigasi. Irigasi yang diusulkan bukan merupakan jaringan 		Direktorat SDA <ul style="list-style-type: none"> - Nomenklatur usulan perlu diubah - Untuk usulann saluran rumah ada di Ditjen Cipta Karya. Sedangkan, air baku di Ditjen SDA 					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini belum ada penyediaan air baku di Wamena, selanjutnya Distrik Walesi Juga belum terdapat air baku - Penyediaan air baku diharapkan menjadi salah satu percepatan pembangunan di Provinsi Papua - Belum ada SR untuk perumahan di Kab. Jayawijaya - Usulan berupa penyediaan jaringan air baku untuk mendukung pusat pemerintahan dan masyarakat - Dapat usulan tersebut terdapat usulan mengenai jaringan irigasi dan air baku <p>Anggota BPP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu memprioritaskan air baku dikarenakan pada distrik Walesi akan membangun kantor gubernur. Hal tersebut dikarenakan pembangunan katnor gubernur akan dibangun pada tahun 2024 	<p>kewenangan pusat sehingga dapat di dukung dengan DAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk air baku sudah ada intake yang selanjutnya dapat berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya - Perlu perbaikan usulan, apakah usulan air baku ataukah irigasi. Terkait usulan air baku tinggal melanjutkan namun perlu koordiNASI Dengan ditjen Cipta Karya <p>Kementerian PUPR (Ditjen Cipta Karya)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengenai instalasi pengolahan air akan dibangun di tahun 2025. - Terdapat permasalahan berupa belum adanya ketetapan pengelola SPAM dari Pemkab. Informasi yang didapatkan bahwa kondisi PDAM Wamena tidak aktif. Apabila sudah ada kesiapan PDAM, operasional dan jaminan kesediaan sudah ada maka dapat dilanjutkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Air baku masuk sebagai wilayah prioritas maka kalau ada usulan yang firm (RC Jelas) dapat diakomodir, namun usulan dalam Krisna selaras harus disesuaikan terlebih dahulu - Jika dilihat dari usulan yang ada di Krisna Selasa maka perlu diperbaiki. <p>Dit. Perkim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan sambungan rumah seharusnya Direktorat Jendral Cipta Karya (Air Minum) 	
--	--	--	---	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		<ul style="list-style-type: none"> - Sumber mata air sudah ada - Pengelolaan ini akan dikelola oleh PDAM - Mengenai nomenklatur sudah sesuai dengan yang ada dalam aplikasi 							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah dan Air Baku	1	0	Km	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Ditolak (diarahkan menggunakan Skema DAK)		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air		Jaringan utama irigasi permukaan dan irigasi rawa yang direhabilitasi			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bapperida Prov. Papua Pegunungan - Sudah dilakukan perbaikan dan diarahkan menjadi jaringan irigasi		Kementerian PUPR - Irigasi di Papua Pegunungan belum ada yang menjadi kewenangan pusat dengan luas dibawah 3.000 Ha.		Dit. SDA - Irigasi merupakan prioritas untuk pemenuhan pangan untuk mendukung pencapaian ketahanan			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

				Sehingga diarahkan untuk menggunakan Skema DAK		pangan tingkat nasional dan lokal - Irigasi air tanah dapat diterapkan dari pusat dan dari daerah. Namun, perlu penajaman RC dalam krisna selaras		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
12	Peningkatan Lapangan Terbang Apalapsili	1	0	Paket	Kab. Yalimo	Kementerian Perhubungan	Ditolak (Diharapkan dapat masuk ke dalam Naskah RPJMN terlebih dahulu)	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Infrastruktur Konektivitas	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Prasarana Bidang Konektivitas Udara		001 - Bandar Udara Baru		
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
		Bapperida Prov. Papua Pegunungan - Status lahan adalah milik Pemda. Apabila perlu masuk RPJMN maka diharapkan dapat masuk dalam RPJMN		Kementerian Perhubungan - Pengelolaan Lapangan Terbang berada di Dinas Perhubungan Kab. Yalimo dan merupakan perintis apalapsili		Dit. Transportasi - Lapangan terbang apalapsili didorong untuk peningkatan. Namun, perlu diselaraskan dengan RPJMN dan Renstra Kemenhub.		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

			<ul style="list-style-type: none"> - Dibutuhkan kejelasan status lahan dan adanya MoU antara Pemda dengan Dirjen Perhubungan Udara - Perlu didorong untuk masuk ke dalam RPJMN untuk pengembangan lapangan terbang - Didorong untuk masuk ke dalam draft naskah RPJMN karena ada nomenklatur perihal peningkatan Lapangan Terbang dalam RPJMN 		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu konfirmasi status lahan Lapangan Terbang serta dibutuhkan kajian mengenai keamanan, keselamatan, jaringan jalan, bandar udara terdekat, kejelasan asset - Untuk lapangan tersebut masih berada ditingkat obsu - Ditolak dengan catatan masih menunggu dokumen Renstra Kemenhub. - Lapter harus memiliki verifikasi dari Kemenhub, namun masih dalam ditahap otoritas bandara (Otban) 			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
13	Pembangunan Rumah Sakit Elvrida Sara Nduga	1	0	Paket	Kab. Nduga	Kementerian Kesehatan	Ditolak (Diarahkan menggunakan DAK)	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		01 - Kesehatan untuk Semua		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		002 - NSPK Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit (LR-11)		
		Catatan dan Tanggapan						

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
		Pemerintah Daerah Bapperida Prov. Papua Pegunungan <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan status dapat menggunakan pembiayaan DAK - Mohon dalam DAK disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang sudah disiapkan 		Kementerian Lembaga Kementerian Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan RS tersebut masuk ke dalam DAK - Dibutuhkan konfirmasi apakah RS ini termasuk dalam lokus - Usulan dialihkan deengan DAK 		Direktorat Sektor Bappenas Dit. KGM <ul style="list-style-type: none"> - RS merupakan RS Eksisting kelas D pratama di Nduga terkait dukungan kapasitas RS eksisting umumnya dari DAK maka usulan ini belum dapat diakomodir - Rencana di DAK 2025-2029 akan ada rencana peningkatan RS kelas D menjadi kelas C yang saat ini kebijakannya masih dalam tahap pembahasan antar Bappenas, Kementerian Kesehatan dan Kemenkeu - Diharapkan daerah dapat menyampaikan proposal dan keperluan dukungan 		
14	Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni	118	0	Unit	Kab. Mamberamo Tengah	Kementerian PUPR	Ditolak	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		Program	Kegiatan	KRO	RO
		IA - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4978 - Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	002 - Penyediaan Rumah Khusus Reguler
Catatan dan Tanggapan					
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas	
		<p>Bapperida Prov. Papua Pegunungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan tersebut sama dengan usulan 'rumah khusus reguler' namun terdapat perbedaan lokasi yaitu di Kab. Mamberamo Tengah - Apakah dimungkinkan apabila volume usulan "Rumah Khusus Reguler" ditingkatkan volumenya selanjutnya dalam pelaksanaannya dibagi 2 menjadi di Kab. Jayawijaya dan Kab. Mamberamo Tengah - Berdasarkan Perpres No. 63/2020 dari 62 daerah tertinggal salah satunya adalah Kab. Mamberamo Tengah, terdapat kriteria berupa ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah. 	<p>Kementerian PUPR (Ditjen Perumahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum dapat diakomodir dikarenakan lokasi belum ada pembahasan - Untuk teknisnya dapat berkoordinasi dengan Balai Perumahan di Provinsi Papua Pegunungan 	<p>Dit. Perumahan dan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibutuhkan konfirmasi apakah perbedaan dengan usulan sebelumnya karena hamper sama dengan "Pembangunan Rumah Khusus Reguler" yang sudah diakomodir - Diharapkan adanya dukungan dari Pemda. 	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		Hal tersebut yang menjadi faktor agar Kab. Mamberamo Tengah diakomodir							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
15	Pembangunan Ruas Jalan Karubaga - Taiyeve	103	0	Km	Kab. Tolikara	Kementerian PUPR	Ditolak (Diharapkan dapat menjadi masukan dalam RPJMN)		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	RDC - OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		003 - Jalan Strategis (ProPN)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
Bapperida Prov. Papua Pegunungan - Ruas jalan tersebut sudah terbangun beberapa Kilometer. Menghubungkan Prov. Papua Pegunungan dengan Prov. Papua	Kementerian Perhubungan - Fokus saat ini berada pada penuntasan Jalan Trans Papua - Usulan tersebut merupakan usulan baru dan belum		Dit. Transportasi - Dit. Transportasi belum menerima RC dengan lengkap. Hanya terdapat DED, sehingga diharapkan adanya kelengkapan RC lainnya						

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		<ul style="list-style-type: none"> - Secara kewilayahan akan menghubungkan Kab. Tolikara dengan Kab. Mamberamo Raya - Terdapat kali Mamberamo yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. - Data sudah disiapkan hingga tahap DED. Akan disampaikan dengan Balai Jalan - Masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan masih berjalan kaki terutama dalam melintasi jalan darat antar kabupaten/distrik/kampung - Kab. Tolikara berada diposisi sentral yang memiliki jalan yang menghubungkan kabupaten berupa lahan lahan pertanian. - Karena kemampuan APBD Kabupaten tidak mampu untuk membuka ruas jalan, sehingga diusulkan menggunakan APBN untuk menjawab pertumbuhan ekonomi secara nasional - Ruas jalan seharusnya dapat menghubungkan antar 	<p>terdapat kajian dari Kemenhub</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penanganan di Prov. Papua Pegunungan berupa penuntasan dikoridor Jalan Trans Papua 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila melihat diusulan, ruas jalan yang diusulkan cukup Panjang - Terdapat penanganan di Papua, namun berfokus pada trase yang merupakan kewenangan pusat terutama Jalan Trans Papua dari Sorong – Nabire – Jayapura – Merauke. Usulan tersebut sudah masuk ke rencana jaringan nasional dan diperhitungkan secara detail - Alokasi Kementerian pada umumnya turun secara drastis, sehingga perlu dilakukan periodesasi ulang terhadap usulan yang bersifat pembangunan - Terdapat kebijakan baru terutama pada wilayah DOB dengan adanya dana khusus dan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat ke Daerah - Untuk pembangunan dengan trase yang cukup Panjang cukup sulit dilakukan karena saat ini fokus adalah pada trase Jalan Trans Papua 	
--	--	--	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		<p>provinsi dan kabupaten di Papua. Apabila berbicara mengenai Trans Papua, tidak hanya menyangkut pada satu ruas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan juga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemahalan di Papua dan diharapkan tidak hanya mengandalkan transportasi udara <p>Anggota BP3OK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Prov Papua Pegunungan dari segi kemahalan dan keterjangkauan sangat tinggi. Diharapkan adanya jalan akses darat dan udara. - Kab. Jayawijaya merupakan sentra seluruh supply logistik. Sehingga, diharapkan Pemerintah Pusat tidak hanya fokus pada pembangunan Jalan Trans Papua - Diharapkan adanya kebijakan khusus bagi 4 DOB. Keterjangkauan di Prov. Papua Pegunungan sangat rendah. Serta adanya 			
--	--	---	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		pertimbangan untuk dapat mengakomodir dalam rangka percepatan							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
16	Pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo	500	0	Meter	Kab. Yahukimo	Kementerian Perhubungan	Ditolak (Dengan catatan pelebaran dapat dibahas secara teknis dalam TM Bersama Kemenhub dan Kemenkeu)		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Prasarana Bidang Konektivitas Udara		Pengembangan Bandar udara Nop Goliat Dekai			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bapperida Prov. Papua Pegunungan -		Kementerian Perhubungan - Bandara tersebut memiliki fasilitas yang bagus dengan 2500 x 45 m, pesawat yang beroperasi adalah atr sehingga dapat dioptimalkan - Saat ini, belum ada rencana perpanjang runway.		Dit. Transportasi - Didukung untuk pengembangan, untuk kondisi - Terdapat usulan tambahan untuk SBSN namun dikarenakan pagu turun			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

			<p>Diharapkan pengembangan akan dilakukan berdasarkan masterplan dan ketersediaan demand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk apron akan dilebarkan, namun dengan adanya keterbatasan pagu maka belum akan dilebarkan - Untuk usulan perpanjangan runway belum dapat diakomodir 		<p>maka akan dibahas lagi pada level teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk usulan perpanjangan runway belum dapat diakomodir, namun untuk pelabaran apron dapat dibahas lebih lanjut dalam TM 				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
17	Penyediaan Bibit Tanaman Pangan	80000	0	Bibit	Provinsi Papua Pegunungan	Kementerian Pertanian	<p>Ditolak</p> <p>(Dengan catatan perlu perhatian lebih lanjut dengan usulan bibit dapat disampaikan dalam Musrenbang Kementan)</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		<p>Bapperida Prov. Papua Pegunungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil rakortek, sudah ada anggaran untuk bibit. Sehingga, usulan diarahkan untuk penyediaan alat - Menu merupakan bibit penyediaan tanaman pangan, sehingga mengajukan untuk menyediakan bibit tanaman pangan unggulan - Diharapkan Provinsi Papua Pegunungan menjadi fokus dan perhatian - Sudah ada pertemuan dengan pimpinan Kementan dengan usulan berupa penyediaan alat dan bibit maka perlu diterjemahkan dengan baik. Mengenai penyediaan bibit unggul sudah disampaikan oleh Pak Menteri untuk diakomodir 	<p>Kementerian Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada rancangan penyediaan bibit saat ranwal di Provinsi Papua Pegunungan - RO penyediaan bibit tanaman pangan ada dalam renja. Namun, belum ada lokasi di Papua Pegunungan. - Pada saat pembukaan e-proposal masih menggunakan Ranwal Kementan. Saat ini, masih dilakukan pembahasan rancangan dan melakukan TM Bersama Bappenas dan Kemenkeu untuk menentukan lokasi yang akan masuk dalam Renja. Saat ini hanya ada anggaran 4,5 T sehingga perlu pembahasan lebih lanjut - Jika mengusulkan alat dan mesin pertanian pangan maka ada dalam rancangan Rakortek. Namun, dikarenakan yang diusulkan penyediaan bibit tanaman belum dapat diakomodir karena usulan penyediaan 	<p>Dit. PP</p> <ul style="list-style-type: none"> - RO masih penyediaan sarana, namun untuk nomenklatur pengadaan bibit, maka RO dapat disesuaikan - Pemda perlu menambahkan jumlah bibit 	
--	--	---	---	---	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

			bibit masih dalam tahap pembahasan rancangan. - DiHARAPkan dapat disampaikan dalam e-proposal Bima yang ditutup pada tanggal 13 Mei disertai dengan kelengkapan RAB dan dokumen lainnya - Akan ada forum Musrenbang Kementan yang dilaksanakan pada bulan Juni. Sehingga, diharapkan notulensi kunjungan Pak Menteri dapat disampaikan dalam Musrenbang Kementan					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
18	Penyediaan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	1	1	Unit	Kab. Jayawijaya	Kementerian Pertanian	Diakomodir	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		002 - Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

No	Usulan	Volume				Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan			
		Usulan	Kesepakatan	Agenda Pembangunan	Sasaran Visi					Arah Pembangunan Nasional		
Catatan dan Tanggapan												
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas							
		Sesuai dengan pembahasan Rakortek	-		-							
19	Penyediaan Sarana dan Prasarana Tanaman Perkebunan	3	0	Unit	1. Kab. Jayawijaya 2. Kab. Pegunungan Bintang 3. Kab. Lanny Jaya	Kementerian Pertanian			Ditolak (Diarahkan menggunakan DAK)			
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional						
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro						
		Program	Kegiatan		KRO		RO					
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan					
		Catatan dan Tanggapan										
				Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		Bapperida Prov. Papua Pegunungan - Usulan berupa pembangunan pengolahan dari pasca panen hingga hasil berupa rumah pengolahan dan alat pengolahan. Usula yang diusulkan menyangkut produksi kopi dari pasca panen sampai pengemasan sampai ke konsumen	Kementerian Pertanian - Dalam Renja Kemnetan tedapat penyediaan sarana dan prasarana tanaman perkebunan. Namun, kabupaten tersebut belum ada rancangan tersendiri - Keterangan usulan dari Papua Pegunungan berupa pembangunan unit pengolahan kopi yang tidak ada di APBN - Kementan mengarahkan usulan tersebut masuk ke dalam DAK yang mana saat ini masih dalam proses pembahasan - Usulan pengolahan kopi tidak ada di APBN. Namun, ada di DAK Kementan	Direktorat Pangan dan Pertanian: - Dalam RPJMN sudah ada masukan dari Dit. Regional III untuk memasukan usulan terkait kopi. Diharapkan Pemda dapat menyiapkan dokumen dan penjelasan secara detail			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
20	Pembangunan Jalan Habema - Wosak - Nduga	10	0	Km	Kab. Nduga	Kementerian PUPR	Ditolak
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		Program	Kegiatan	KRO	RO
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)
Catatan dan Tanggapan					
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas	
		<p>Bapperida Prov. Papua Pegunungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengenai usulan jalan Habema – Kenyam masih satu sirip dengan jalan nasional. Usulan merupakan alternatif dengan jarak yang pendek - Dari bts batu – Kenyam sudah beroperasi dengan diwujudkan transportasi air dan berhasil menurunkan harga-harga pokok - Ruas jalan tersebut merupakan ruas jalan dengan status jalan provinsi. Namun, zona tersebut seharusnya masuk ke Ruas Jalan Nasional karena merupakan trase Jalan Nasional - Ruas tersebut akan menghubungkan bagian utara dan selatas sehingga 	<p>Kementerian PUPR (Ditjen Bina Marga)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk jalan nasional berfokus pada jalan trans papua. Namun, untuk segmen 5 (Habema-Wosak-Nduga). Melihat segmen usulan tersebut ada kendala keamanan sehingga dari PUPR belum dapat masuk - Sudah terdapat trase sendiri untuk ruas jalan tersebut. Ruas jalan trans papua Habema – Humudi – Wosak - Dapat terlihat jelas trase yang akan dikerjakan. - Ruas jalan yang diusulkan masuk ke ruas jalan provinsi, apabila ruas jalan provinsi maka tidak dapat diakomodir 	<p>Direktorat Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan tersebut merupakan penghubung dengan Kab. Jayawijaya dan sirip Jalan Trans Papua - Ruas tersebut dari Jalan Trans Papua masuk ke dalam Segmen V namun terdapat permasalahan berupa keamanan - Masih berfokus pada ruas utama Jalan Trans Papua - Saat ini, belum bisa mengakomodir ruas jalan tersebut 	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

		dapat menurunkan harga pokok			
--	--	------------------------------	--	--	--

3. REKAPITULASI

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Diakomodir	8
Ditolak	16
Tidak Terbahas	0